

BAB III

PENGARUH DAN IMPLIKASI IDEOLOGI IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI INDONESIA

Islam adalah sistem yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah suatu tatanan hidup yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi dan negara. Adalah Partai Keadilan Sejahtera yang para pendiri dan pendukungnya meyakini keuniversalan ajaran Islam melingkupi seluruh kehidupan manusia dan kemanusiaan.¹

Keuniversalan ajaran Islam yang diyakini oleh para pendiri dan pendukung PKS menjadikan PKS sebagai salah satu partai Islam di Indonesia yang mempunyai ideologi yang khas (berbeda) dengan partai Islam lainnya yang ada di Indonesia. Keyakinan tersebut justru menjadikan PKS sangat mirip dengan pergerakan Islam lainnya di dunia, terutama Ikhwanul Muslimin. Sampai seorang pemikir Ikhwan kontemporer Prof. DR. Yusuf al-Qordhowi mengidentikkan PKS sebagai kepanjangan tangan dari Ikhwanul Muslimin. H. Anis Matta, Lc tidak menampik pengaruh Ikhwanul Muslimin, tapi ia menegaskan, bahwa pengaruhnya hanya sebatas pemikiran dan wacana saja.²

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Muhammad Darul Fallah, beliau mengatakan bahwa PKS memang mempunyai banyak persamaan pemikiran dengan Ikhwanul Muslimin walaupun tidak dalam keterkaitan organisasi.³ Lepas dari kemiripan tersebut, satu hal yang pasti bahwa pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan dasar partai dalam bidang politik dan pengembangan agama.

A. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera

¹ DPP PK, *Jatidiri PK*, Pustaka Tarbiyatuna, 2002, hal. 20

² Nandang Burhanuddin, *Penegakkan Syari'at Islam Menurut PKS*, Jakarta; Al-Jannah Pustaka, 2004, hal 98

³ Wawancara dengan Muhammad Darul Fallah selaku Ketua Dewan Pengurus PKS Wilayah , Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Pengaruh dalam Bidang Politik

Untuk mengetahui pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera berikut akan dijelaskan tentang prinsip-prinsip kebijakan dasar partai Keadilan Sejahtera, diantaranya; ⁴

a. *Syumuliyah* (Komprehensif)

Maksudnya adalah lengkap dan integral; yaitu kebijakan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, prespektif dan sinkronisasi. Peletakan prinsip *Syumuliyah* sebagai prinsip kebijakan dasar partai sangat sesuai dengan asas atau ideologi yang dimiliki PKS yang menjadikan Islam sebagai sistem yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan.

Pengaruh IM dibidang politik adalah PKS adalah organisasi islam yang sama-sama mengusung prinsip dan nilai bahwa Islam adalah solusi (*Al-Islam Hual Hill*), visi dan misi kedua organisasi islam ini juga relatif sama, itu terlihat dari slogan-slogan dan visi misinya yang terkenal seperti Allah Tujuanku, Muhammad Suri Tauladanku, Al-Quran pedoman hidupku dan Mati dijalan Allah adalah cita-cita tertinggiku.

IM adalah organisasi yang secara keras menolak asas lain sebagai asas berbangsa dan bernegara, menurut organisasi ini Al-Quran dan Sunnah atau Islam adalah landasan organisasi dalam mengambil setiap kebijakan yang terkait dengan berbangsa dan bernegara. Menurut IM tak akan ada ideologi yang bisa bertahan lama selain ideologi Islam. Komunis, Sosialis dan semua ideologi lainnya tak akan mampu bertahan sebagaimana ideologi Islam mampu bertahan seperti yang terlihat saat ini, seberat apapun cobaan yang dihadapi islam, semua itu tak membuat ideologi ini mati,

⁴ Ali Said Damanik, *Fenomena PK, Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Bandung; Teraju, September 2002) h, 281

malah bahkan justru sebaliknya semakin ditekan ideologi ini semakin menguat, karenanya Al-Quran dan Islam adalah keputusan final IM, IM kemudian terkenal dengan simbolnya *Al Islam Hual Hill* (Islam adalah Solusi kehidupan)

Sikap PKS hampir sama dengan sikap IM begitu sangat kuat dengan penggunaan ideologi Islam dan menganggap bahwa Islam adalah final dan tidak lagi mengkotak-kotakkan antara nasionalisme dan Islam karena dua kata ini bagi PKS adalah dua istilah yang bisa berjalan beriringan, serta semangat mengkotak-kotakkan dua istilah ini hanya untuk tujuan politik sesaat yang harus ditinggalkan.

PKS dalam AD ART nya menyebut Islam adalah Asas partai walau tetap mengakui Pancasila dan UUD 1945 namun tidak mau meninggalkan asas Islam sebagai simbol berbangsa bernegara sebuah sikap yang begitu kuat sama seperti yang tunjukkan IM di Mesir

Ideologi dan platform partai PKS tidak bisa dilepaskan dari ideologi yang dianut oleh PKS yaitu ideologi Islam. Dalam Anggaran Dasar PKS disebutkan dengan jelas bahwa PKS adalah partai Islam yang berasaskan Islam. Dengan demikian PKS telah menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi. Di dalam kebijakan dasar PKS disebutkan bahwa PKS akan :

- 1) Mempromosikan Islam sebagai sebuah ideologi umat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, dan
- 2) Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan membebaskan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT, pembebasan manusia dari kekafiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam, dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan dasar akidah, asas, dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional.

Dalam amanat Presiden PKS menyebutkan ada empat sektor yang harus segera dibenahi agar Indonesia menjadi negara besar. Kader-kader PKS harus jadi garda terdepan bersama komponen bangsa lainnya untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. Amanat Presiden PKS menyebutkan ada empat sektor yang harus segera dibenahi agar Indonesia menjadi negara besar. Pertama sektor demografi dengan memberi ruang anak muda - generasi milenial - untuk berkarya, kedua sektor teknologi dengan menguatkan riset dan inovasi iptek, sektor politik dengan partisipasi publik yang lebih kritis serta sektor ekonomi dengan optimalisasi produksi sumber daya kelautan dan pertanian.

b. *Al-Ishlah* (Perbaikan)

Kebijakan juga di muat dalam AD/ART tahun 2005/2006, bab Prinsip Kebijakan Dalam hal ini, kebijakan yang ditempuh berorientasi pada perbaikan individu, masyarakat, pemerintah dan negara. Kebijakan ini dibuktikan dari adanya karakteristik reformis yang dimiliki PKS yang konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan.

Contoh dari *al-Ishlah* atau perbaikan di wilayah DIY yaitu PKS upaya perbaikan dalam Operasional Trans Jogja yang mengecewakan banyak pihak misalnya Insiden itu antara lain warmsteer patah, ban roda lepas, terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan satu orang meninggal serta mogok di tengah jalan yang membuat penumpang harus mendorongnya. Atas insiden tersebut, Komisi C DPRD DIY

memanggil Unit Pengelola Teknis (UPT) Trans Jogja Dinas Perhubungan DIY. Legislator juga meminta PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku BUMD milik Pemda DIY yang ditunjuk sebagai operator Trans Jogja untuk melaporkan kinerjanya tiga bulan sekali. Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Arief Budiono mengaku kecewa dengan operasional armada Trans Jogja, terutama 34 generasi pertama sejak 2008 bermerk Hyundai. Bus tersebut sudah tidak layak jalan, namun tetap dipaksakan beroperasi. Atas temuannya itu, DPRD meminta UPT Trans Jogja membuat laporan evaluasi pelaksanaan pelayanan setiap tiga bulan selama 2016. Langkah tersebut setidaknya untuk mengantisipasi agar insiden yang pernah dialami Trans Jogja tidak terulang lagi.

Contoh lainnya yaitu Ishlah terhadap internal PKS pada saat terjadi kasus terlibatnya mantan ketum PKS Lutfi Hasat Ishaq dalam korupsi impor daging sapi. Ketika kasus ini mencuat PKS dengan cepat mengambil sikap meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kemudian mengganti ketum mereka. Serta mengklarifikasi kasus ini kepada anggota dan partisipannya hingga tingkat bawah.

c. *Al-Syari'ah* (Konstitusional)

Kebijakan ini selalu mempertimbangkan aspek fleksibilitas dan legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kitab suci menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik.

Fraksi PKS DPRD DIY berpesan agar KGPAA Paku Alam X yang akan ditetapkan sebagai Wakil Gubernur DIY terus menjaga Keistimewaan DIY. Sikap tersebut tertuang dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna Penetapan Wakil Gubernur di DPRD DIY. Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Arief Budiono mengatakan, Keistimewaan DIY adalah penghargaan dan pengakuan dari rakyat Indonesia atas jasa-jasa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah

berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan NKRI.

Arief mengungkapkan, Kadipaten Pakualaman juga memiliki peran luhur sebagai pengemban kebudayaan. Harapannya sebagai pengemban kebudayaan yang luhur juga bisa tercermin dalam jabatan wakil Gubernur DIY, di tengah tantangan budaya global.

d. Al-Wasath (Moderat)

Dalam hal ini kebijakan, program, sikap dan perilaku sejalan dengan masyarakat Muslim yang “pertengahan” (*Ummatan Wasathan*), jauh dari kesan ekstrimitas dan eksageritas. Kegiatan yang dapat menjelaskan tentang al-wasath di wilayah DIY adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY kembali menggelar lomba baca kitab kuning bertempat di Gedung DPW PKS DIY, kegiatan ini diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari berbagai pondok pesantren di DIY. Menurut Ketua Bidang Pembinaan Umat (BPU) DPW PKS DIY Agus Efendi, peserta Lomba Baca Kitab Kuning tahun ini lebih banyak dari lomba tahun lalu. Kitab Kuning yang menjadi materi lomba adalah Kitab Fathul Mu'in karangan Syaikh Zainudin Al-Malibari.

Selain sebagai bentuk apresiasi dan syi'ar agama, PKS berharap dengan event ini dapat mendorong minat masyarakat untuk belajar di pesantren. Pondok pesantren dan institusi pendidikan agama terbukti mampu menjadi wahana penanaman akhlaq dan moral, wahana pembentukan karakter yang unggul. Ini penangkal efektif terhadap bahaya radikalisme. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan pondok pesantren tempat pembinaan teroris. Sebaliknya dengan pemahaman agama yang baik akan menangkal bibit terorisme”, ujar Agus Mas'udi selaku Wakil Ketua DPW PKS DIY.

e. Al-Istiqamah (Komitmen dan Konsisten)

Dalam hal ini, kebijakan, program dan langkah operasional harus *istiqamah* (taat asas) konsisten dan *istimrar* (kontinyu). Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syura PKS, melakukan kunjungan ke Yogyakarta dalam rangka memberikan Taujih Kebangsaan dan Keumatan dengan tema Berkhidmat untuk Rakyat. Dalam acara yang diselenggarakan di Aula DPW PKS DIY ini, Salim Segaf mengingatkan para kader PKS untuk banyak melakukan kebaikan. Jangan sampai slogan berkhidmat untuk rakyat ini hanya menjadi sekedar slogan, pesannya. Dalam Al Qur'an, ujarnya, Allah SWT perintahkan kita untuk rukuk, sujud dan beribadah. Ayat itu ditutup dengan perintah waf'alul khair, berbuat kebaikan. Allah janjikan 70 ribu malaikat akan mendoakannya. berbuat kebaikan ini menjadi karakter PKS dan Bila perlu dalam setiap kelompok pembinaan dijadikan syiar. "Memastikan setiap kader melakukan kebaikan setiap hari. Kepada tetangga, teman dll. Kebaikan tidak saja slogan, "Jika politik dianggap wilayah yang kotor, maka berkecimpung di dalamnya akan berkonsekuensi mengotori spiritualitas (ruhiyah). Tapi, jika politik adalah medan dakwah, maka pada saat yang sama ia akan menjadi sarana tarbiyah, termasuk tarbiyah ruhiyah.

1. Keteladanan Anggota Legislatif

Anggota Legislatif telah tampil menjadi simbol kejujuran. Bahkan, sebagian mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk menentang penyimpangan (kasus suap pencalonan Bupati; pengungkapan sogokan DPR Propinsi; dan lain-lain). Sebagian lagi terus memelihara kepekaan terhadap derita kemiskinan rakyat dan kesederhanaan para kader PKS. Sehingga setiap kali akan menikmati gajinya dan berbagai fasilitas dewan, yang terbayang adalah kemiskinan masyarakat dan para kader partai.

2. Keteladanan Fungsionaris dan Kader

Tim Lajnah Pemilu Pusat (LPP), ketika keliling ke daerah, telah menyaksikan fungsionaris dan para kader menghidupkan jihad maali (tabungan pemilu) di tengah berbagai kendala keuangan mereka. Mereka tetap menyumbang walaupun hanya recehan di sela-sela menyisihkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

3. Keteladanan Tokoh Umum dan Simpatisan

Seorang tokoh nasional menolak ajakan sebuah partai besa untuk bergabung dan menduduki posisi strategis. Ia lebih memilih menjadi kader PKS. Sekalipun dengan ini, ia tidak mendapatkan posisi apapun di PKS. Itu semua karena panggilan idealismenya. Padahal, tokoh-tokoh yang lain sibuk melakukan intrik untuk duduk di salah satu partai besar itu.

f. **Al-Numuw Wa Al-Tathawwur** (Tumbuh dan Berkembang)

Ini dimaksudkan agar kebijakan, program dan langkah operasional harus concern dengan pengembangan SDM, akselerasi dan ekspansi potensi. Kegiatan ini dilakukan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS secara khusus membawa tema "Ketahanan Keluarga sebagai Fondasi Ketahanan Bangsa". Dra. Wirianingsih, M.Si, selaku Ketua BPKK DPP PKS menyatakan safari yang dilakukan ke seluruh propinsi ini membawa misi besar untuk mendorong semua BPKK di wilayah menjadikan isu keluarga sebagai isu utama kegiatan PKS. Keluarga adalah institusi paling kecil tetapi sangat menentukan masa depan bangsa. Jika keluarga-keluarga yang ada baik, harmonis, dan produktif maka bangunan bangsa ini akan menjadi kokoh. Tidak sedikit anak dan remaja yang kecanduan pornografi, kecanduan game online. Sementara orang tua tidak perhatian kepada keluarga. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak kasus dan masalah keluarga yang bermunculan.

g. **Al-Tadarruj Wa Al-Tawazun** (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)

Dalam hal ini kiprah partai baik individu maupun kolektif lengkap dengan kebertahanan dan keseimbangan yang sesuai dengan sunnatullah.

h. Al-Awlawiyat Wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)

Maksudnya; bahwa kebijakan, program dan langkah operasional selalu memperhatikan aspek strategis dan taktis sehingga efektif dan efisien. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan utama dan pertama.

Contoh kongkrit dari prinsip ini adalah kebijakan PKS di DIY yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di DIY, misalnya adanya relawan PKS DIY bersama TNI melakukan pencarian korban tanah longsor di Desa Karangrejo, Loano, Purworejo. DPW PKS DIY mengirim 12 personil relawan bencana Pandu Keadilan. Sebelumnya, pada hari senin relawan PKS DIY melakukan kerja bakti membersihkan lumpur yg masuk ke asrama santri putri dan santri putra, di pondok pesantren Nurul Wahid asuhan Ustd. Thohari dan KH. Syaefuddin, serta ruang kelas di SMPIT Ulil Albab. Pondok pesantren Nurul Wahid ada di Krandegan, Bayan, Purworejo yang termasuk daerah yang mengalami musibah banjir.

Hamam Cahyadi, ketua komisi C DPRD Kulonprogo dari fraksi PKS meninjau lokasi banjir menemui langsung masyarakat. Saat ditemui di lokasi banjir di Krembangan Panjatan, Hamam bersama beberapa relawan PKS sedang menyampaikan bantuan dari penggalangan spontanitas dari kader PKS kepada perwakilan masyarakat

h. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi Masa Depan)

Adalah kebijakan dan program yang selalu dikaitkan dengan dimensi waktu (masa lalu, kini dan akan datang) sehingga melahirkan sifat optimis dan penuh perhitungan. Prinsip ini dapat dilihat dari adanya kegiatan Milad yang dilakukan PKS. Milad PKS ke-18 diwarnai kegiatan yang menarik, yaitu Lomba Membaca Kitab Kuning. Lomba

yang diinisiasi oleh Fraksi PKS DPR-RI ini dilakukan di tingkat wilayah dan final lomba tingkat nasional. Lomba tersebut di DIY yang diikuti oleh 45 peserta yang mewakili berbagai Pondok Pesantren. Dalam pembukaan acara Lomba, Ketua DPW PKS DIY, Muhammad Darul Falah mengatakan bahwa PKS memiliki kader-kader terbaik yang juga berasal dari pondok pesantren. Pondok pesantren juga melahirkan banyak tokoh hebat yang berkontribusi terhadap bangsa. Sistem pengajaran dengan Kitab Kuning terbukti mampu menghasilkan santri yang memiliki pemahaman agama yang mendalam. Dalam Milad PKS memberikan apresiasi positif terhadap kontribusi pensantren salaf dan berharap metode Kitab Kuning tetap lestari dalam khasanah keilmuan di Indonesia.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI yang juga anggota dewan dari DIY. Sukamta menjelaskan, bahwa penyelenggaraan Lomba Membaca Kitab Kuning dari laporan berbagai wilayah berjalan sukses dan diikuti oleh banyak santri pondok pesantren. Fraksi PKS DPR RI sangat perhatian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, yang tidak hanya berorientasi kepada kecerdasan pikiran tetapi pendidikan yang juga menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter dan berakhlaq mulia. Di lingkungan pesantren, sebelum santri belajar ilmu maka ia harus belajar adab terlebih dahulu. Menurutnya, contoh baik di pesantren ini perlu dikembangkan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

i. Al-Alamiyah (Bagian dari Dakwah Sedunia)

Kebijakan yang diambil dan program yang dicanangkan selaras dengan kebijakan dakwah yang bersifat 'alami dan tunduk pada *sunnatudda'wah* serta tidak mengabaikan persoalan khas wilayah negaranya.

Kegiatan ini dapat dilihat dari adanya bantuan kemanusiaan yang dilakukan PKS DIY, yang memfasilitasi pengumpulan bantuan untuk pengungsi Rohingya dari

berbagai pihak dengan memberikan donasi, termasuk dari kader dan simpatisan PKS hingga masyarakat kemudian disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang selama ini sudah bekerja banyak membantu para korban genosida Rohingya.

Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politik PKS didasarkan atas tiga prinsip, yaitu (1) kemenyeluruhan dan finalitas sistem islam; (2) Otoritas syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan Ijtihad dan (3) kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.

Dilihat dari sisi ideologi, PKS memiliki keterkaitan dengan ideologi gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Hal ini dapat dilihat dari doktrin *Syumuliatu Al-Islam* yang dianut PKS, yaitu pemahaman terhadap agama Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, mencakup seluruh aktivitas manusia, termasuk di dalamnya aktivitas politik. Dalam konteks Al-Ikhwan Al-Muslimun, konsep *Syumuliatu Al-Islam* tersebut merupakan doktrin dasar dan bahkan menjadi salah satu karakteristik yang paling menonjol dari gerakan tersebut.⁵

Keterkaitan PKS dengan Ikhwanul Muslimin sendiri juga diakui oleh Anis Matta, seorang tokoh dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan:

"Inspirasi-inspirasi Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam diri Partai Keadilan Sejahtera, kalau boleh digarisbawahi disini, sesungguhnya memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus. Pertama, inspirasi ideologis yang salah satunya didasarkan kepada prinsip *Syumuliyat Al-Islam*, sesuatu yang bukan hanya menjadi prinsip perjuangan Hasan Al-Banna saja, tapi juga pejuang-pejuang yang lain. Kedua, inspirasi historis, semacam mencari model dan maket dari sebetuk perjuangan Islam di era setelah keruntuhan Al-Khilafah Al-Islamiyah dan dominasi imperialisme barat atas negari-negeri Muslim. Tetapi yang mempertemukan dua inspirasi itu pada diri Hasan Al-Banna dan Al-Ikhwanul Muslimin, adalah pada aspek denyut pergerakannya. Sebab pada saat tokoh-tokoh yang lain menjadi pembaharu dalam lingkup pemikiran, Hasan Al-Banna berhasil mengubah pembaharuan itu dari wacana menjadi gerakan. Dan tidak berlebihan, bila inspirasi

⁵ Asy Muhammad Furkon, Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, Jakarta: Teraju, 2004.

gerak itu juga secara terasa dapat diselami dalam denyut Partai Keadilan Sejahtera.
6

Dalam bidang politik, PKS akan memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk tujuan tersebut, maka PKS membangun komunikasi politik baik dengan konstituennya maupun dengan bangsa Indonesia pada umumnya. Bagi PKS komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan, yakni suatu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan.

2. Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin dalam Bidang Dakwah

Pengaruh konsep ideologi Ikhwanul Muslimin dapat lebih mudah diidentifikasi dalam bidang keagamaan, hal tersebut dapat kita lihat dalam tahapan-tahapan dakwah yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tahapan-tahapan tersebut di antaranya;⁷

a. *Tabligh* (Penyampaian)

Tabligh dalam dakwah bil-lisan yang biasanya berbentuk ceramah-ceramah atau taushiyah-taushiyah yang bersifat umum. Sasarannya adalah khalayak ramai dengan materi-materi ceramah yang bersifat kemasyarakatan, agar dapat membentuk pola pikir keislaman yang lebih baik dan benar pada masyarakat umum.

Contoh kegiatan yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar acara Halal bi halal dengan tema “Nyawiji lan Migunani” pada Ahad, 9 Juli 2017 bertempat di Balai Budaya Gambiran .Acara ini selain dihadiri kader, simpatisan dan warga masyarakat, PKS DIY juga menghadirkan

⁶ Anis Matta, “Kata Pengantar” dalam Aay Muhammad Furkon, Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, Bandung : Teraju, 2004, sebagaimana dikutip Haedar Nashir, (2007) Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah? Cet Ke-5 Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, hlm 33-34.

⁷ Majalah Sabili (edisi khusus), no 09, thn 2003, h. 140. Penjelasan tentang tahapan ini juga dijelaskan dalam buku Nani Machendrawati dan Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2001) h. 31-34

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid untuk memberikan tausiyah. Hidayat mengungkapkan sejarah bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibukota Indonesia, dari 4 Januari 1946 sampai 18 Desember 1948. Dan saat ibukota ada di Yogyakarta itulah Halal bi halal lahir. Adalah KH. Wahab Chasbullah yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno istilah Halal bi halal untuk acara yang bisa menyatukan kembali para tokoh bangsa yang saat itu terlihat tidak akur, susah untuk duduk dalam satu forum. KH. Wahab Chasbullah berpendapat mereka yang tidak akur berarti dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan,” Hidayat juga mengingatkan bahwa dari Halal bi halal ini bisa diambil semangat untuk melakukan perbaikan bangsa dan negara dengan halal atau cara-cara yang baik.

b. Ta’lim (Pengajian)

Pada tahap ini dakwah yang dilakukan lebih sistematis dan tematis, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 10-15 orang yang dibina oleh seorang *Murabbi* (pendidik) yang sering dikenal dengan istilah liqo’, program dalam tahapan ini diperuntukkan untuk semua kader dari seluruh jenjang misalnya DPC PKS kecamatan kasihan mengadakan liqo’ satu kali dalam sepekan mengkaji masalah agama dan praktiknya.

c. Takwin (Pembentukan)

Pada tahap ini dakwah yang dilakukan adalah dengan pembentukan dan pembinaan kader. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya team kaderisasi dan kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan bermacam-macam, diantaranya; Dauroh, Mabit, Rihlah atau bentuk yang rutin seperti Tastqif. Tujuan dari dakwah tahap ini adalah terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian kader atau melaksanakan dakwah untuk pembebasan aqidah dari sistem aqidah yang menjadikan

keinginan subyektif menuju sistem aqidah ‘alamiah yang meng-Esakan Allah secara murni. Kegiatan yang dilakukan DPD PKS di DIY adalah dengan mengadakan dauroh setahun sekali yaitu kegiatan perkemahan kader partai di wilayah DIY.

d. Tandzim (Pembinaan dan Penataan Kader)

Pada tahapan ini, internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk konstitusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas *sosial*. Dalam hal ini, PKS menata kader menjadi beberapa jenjang, diantaranya; Jenjang Pemula, Muda, Madya, Dewasa, Ahli, Purna dan Kehormatan. Tujuan dari pola atau tahap penataan dan pembentukan tersebut telah penulis jabarkan dalam bab sebelumnya yaitu bab II point sistem pembinaan.

e. Tanfidz (Pelaksanaan)

Tahap ini biasanya disebut dengan sikap aksi, karena tahap ini merupakan aplikasi atau pelaksanaan amal jama’i menuju produktifitas kerja dakwah yang optimal. Karena PKS merupakan partai politik peserta PEMILU, maka tanfidz menjadi satu hal yang mesti dilakukan dalam rangka menjadi “Pelayan Ummat”.

Saat ini PKS tidak saja menjalankan aktifitas politiknya dalam segmen lembaga *legislatif* di parlemen saja, baik di tingkat pusat (DPR/MPR RI) maupun di daerah-daerah (DPRD I dan DPRD II), tetapi sudah ada yang beraktifitas dalam lembaga eksekutif di daerah-daerah seiring dengan digulirkannya sistem otonomi daerah yang berlanjut dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau yang lebih dikenal dengan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah).

Dari kelima tahapan dakwah tersebut, terlihat banyak kemiripannya dengan tahapan dakwah yang dimiliki oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, bahkan dapat dikatakan bahwa tahapan dakwah PKS mengadopsi tahapan dakwah Ikhwanul Muslimin. Dari uraian di atas mengenai tahapan dakwah yang dilakukan PKS maupun IM sangat mirip sekali, walaupun

IM membagi tahapan dakwahnya menjadi tiga tahap, tetapi dari segi substansi tidak ada perbedaan. Jika PKS membagi tahapan dakwahnya menjadi lima tahapan, menurut analisa penulis itu merupakan penyempurnaan metode dakwah yang telah dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin sebelumnya.

Adapun rincian dari kesamaan tahapan dakwah tersebut ialah;

- a. Jika Ikhwanul Muslimin tahap pertamanya menggunakan istilah *Ta'rif* (Pengenalan) untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat dengan program-program yang telah di jelaskan sebelumnya, maka PKS membagi tahapan ta'rif ini menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah *Tabligh*; penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat secara massal dan terbuka. Lalu tahap kedua adalah pengenalan selanjutnya dilakukan secara khusus dalam tahapan ta'lim. Dalam tahap ta'lim ini, selain pesertanya adalah orang yang sangat tertarik sekali dengan ajaran Islam dan tentunya menjadi lebih sedikit dibandingkan ketika tahap tabligh sebelumnya, juga materi yang disampaikan pun sudah lebih dalam dan mendetail.
- b. Kalau Ikhwanul Muslimin menempatkan *takwin* (Pembentukan) sebagai tahapan keduanya sebagai tindak lanjut dari pengenalan yang sudah dilakukan. Dalam tahapan takwin ini Ikhwanul Muslimin melakukan seleksi untuk menyaring orang-orang yang mau turut berjuang bersamanya. Maka PKS pun menggunakan istilah yang sama seperti yang ada pada Ikhwanul Muslimin dengan penerapan yang sama pula. Tetapi bedanya PKS melanjutkan lagi pada tahapan ini dengan tahapan *Tanzim* (Penataan), dalam tahapan penataan ini PKS mengorganisir seluruh anggotanya dengan struktur dan jenjang yang teratur. Dalam tahapan ini sebenarnya antara PKS dan Ikhwanul Muslimin ada pada substansi yang sama, hanya PKS melakukan penyempurnaan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Dalam tahapan akhir dari metode dakwah yang dilakukan oleh Ikhwanul

Muslimin dan PKS adalah sama, yaitu *Tanfidz* (Pelaksanaan). Ini adalah muara dari tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelumnya, hakikat tahapan dakwah yang hakiki sebenarnya ada pada tahapan ini, seperti apa yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Antara PKS dan Ikhwanul Muslimin tidak ada perbedaan baik dari segi istilah maupun dari segi aplikasinya.

Dari paparan dan deskripsi tentang berbagai kebijakan politik dan tahapan dakwah yang dimiliki oleh PKS, kita dapat melihat jelas bahwa secara tataran konseptual ada kesamaan dengan Ikhwanul Muslimin, akan tetapi dari segi pelaksanaan atau dari sudut aplikasi ataupun tehnik tentu ada perbedaan, semuanya tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada.

PKS memasuki kampus melalui pendekatan LDK-LDK (Lembaga Dakwah Kampus) yang ada, PKS secara rutin mengadakan rekrutmen oleh senior-senior kampus yang memang secara pemikiran telah terpengaruhi ide-ide PKS, kegiatan-kegiatan ini secara berkala kemudian membuat pola rekrutmen politik secara massif dan gradual.

Bagi penyebar ideologi Timur tengah, Masjid adalah tempat yang paling netral untuk menyebar luaskan faham Timur tengah, itu karena Masjid adalah tempat terstrategi dan teraman serta ternetral untuk menyebarkan ideologi ini. Masjid dianggap sebagai tempat berkumpulnya semua ummat islam dan tak mengenal batas-batas aliran faham politik dan faham lainnya, karenanya masjid kemudian menjadi arena rekrutmen partai politik salah satunya adalah PKS.

PKS dengan bermodalkan alumni sarjana Timur tengah yang menguasai ilmu agama secara baik selalu membidik masjid sebagai tempat rekrutmen, jamaah masjid secara berkala dikunjungi dan menjadwalkan kajian-kajian islam yang kemudian secara sistimatis dan gradual membentuk para pengikutnya mau dengan sukarela dan semangat mengikuti partai politik yang diyakininya.

Kampus adalah lapangan rekrutmen luas yang dijadikan PKS sebagai ajang rekrutmen kader-kadernya secara militan dan kuat sehingga memang dilapangan terlihat mahasiswa mahasiswa berideologikan PKS begitu kuat dengan prinsipnya yang memang telah dibentuk untuk menjadi kader-kader partai yang handal dengan serangkaian latihan dan ujian-ujian kompetisi. Setiap partai politik yang ada di Indonesia harus dijalankan dan dihidupkan oleh orang Indonesia sendiri dan hal ini telah diatur dalam undang-undang partai politik.

B. Implikasi Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera

Di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai yang lahir di masa reformasi. Partai Keadilan Sejahtera baik dalam visi, misi, manifesto maupun dalam tujuannya yang termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) nya tidak menyebutkan akan mendirikan negara Islam. Meski Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa antara Islam dan negara (politik) tak bisa dipisahkan, namun mendirikan negara Islam adalah persoalan lain. Demikian juga dengan penerapan syariat Islam bukan sesuatu yang harus menjadi dagangan politik, tapi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan.

Munawir Syadzali dalam bukunya *Islam dan Tata Negara* memandang ada tiga konsepsi dalam memahami hubungan antara Islam dan negara.⁸ *Pertama*, Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah; Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Banna, Abul ‘Ala al-Maududi, Sayyid Quthb dan lain-lain. *Kedua*, Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tak memiliki hubungan apapun dengan urusan kenegaraan, dasarnya adalah bahwa Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa

⁸ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta;UIP 1993) hal 2

seperti halnya rasul-rasul sebelumnya. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Abd al-Raziq dan Thaha Husein. *Ketiga* adalah para pemikir yang menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, sehingga para pemikir tersebut menolak anggapan bahwa dalam Islam terdapat system ketatanegaraan.

Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Aliran ini mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat system ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Walaupun tidak mengakui adanya negara Islam, para pemikir mengharuskan adanya pengadopsian terhadap tata nilai etika Islam dalam pengelolaan negara dan dalam membangun akuntabilitas pemerintahan. Tokoh yang cukup menonjol dalam aliran ini adalah DR Muhammad Husein Haykal penulis buku *Hayatu Muhammad dan Fi Manzil al-Wahyi*⁹

Hasan al-Banna dalam mengungkapkan pikirannya tentang negara Islam menggunakan dua istilah; negara Islam (*daulah Islamiyah*) dan memperbaiki negara (*Islahud daulah*), kedua istilah ini digunakan secara *resiprokal*. Karena itu dalam memahami pemikiran Hasan al-Banna tentang negara Islam terjadi dwiinterpretasi. Mendirikan negara Islam, artinya mengganti pemerintahan yang ada dengan cara apapun dan mendeklarasikan sebagai negara Islam (seperti revolusi Iran). Kedua, karena negara ini milik umat Islam dan dikendalikan oleh orang-orang Islam yang *fasiq* (rusak), maka sudah sepatutnyalah negara ini diperbaiki dengan menerapkan nilai-nilai Islam.¹⁰

Interpretasi kedua inilah yang dipahami Anis Matta, sebenarnya Hasan al- Banna tidak secara persis mengatakan mendirikan negara Islam (*daulah Islamiyah*), yang al-Banna katakan adalah memperbaiki negara (*Islahud Daulauh*). Artinya memperbaiki

⁹ *Ibid*, hal 3-6

¹⁰ Zainal Abidin Ahmad, (*Membangun*) *Negara Islam*, (Yogyakarta;Pustaka Iqra 2001) hal 1-2

negara yang sudah ada yang dihuni mayoritas Islam. Ketika Hasan al-Banna berbicara tentang negara Islam di sebuah negara yang dihuni mayoritas Muslim, karenanya dia tidak perlu mengatakan mendirikan negara Islam, tetapi perlu mengelola negara ini dengan cara Islam. Islahud Daulah ini bisa dilihat dari tahapan kerja Partai Keadilan Sejahtera adalah membangun pribadi Muslim, keluarga Muslim, masyarakat Muslim memperbaiki negara Muslim.¹¹

Menurut Hasan al-Banna negara Islam adalah negara yang merdeka, yang tegak di atas syari'at Islam, bekerja dalam rangka menerapkan system sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsipnya yang lurus, dan menyampaikan dakwahnya yang bijak ke segenap umat manusia.¹² Negara Islam tidak akan pernah tegak kecuali di atas fondasi dakwah, karena negara Islam adalah negara yang mempunyai keinginan kuat untuk menegakkan misi, bukan sekedar bagan sturuktur, bukan pula pemerintahan yang matrealistis dan gersang tanpa ruh di dalamnya. Demikian juga dengan dakwah, tidak mungkin tegak kecuali jika ada jaminan perlindungan yang menjaga, menyebarkan dan mengukuhkannya.¹³

Dalam konteks ini, mengapa perlu negara Islam, karena salah satu tugas negara Islam adalah untuk menjaga keimanan. Sebab menyebarkan Islam dengan berkhotbah saja tidak cukup, tetapi mesti dibantu oleh kekuatan negara. Jika negara tidak menjaga Islam, maka dikhawatirkan kekuasaannya akan jatuh. Menurut Al-Banna selama negara Islam belum tegak, maka seluruh kaum muslimin berdosa, mereka bertanggungjawab di hadapan Allah, karena pengabaian mereka untuk menegakkannya dan keengganan mereka untuk mewujudkannya.¹⁴

¹¹ *Ibid*, hal 6

¹² Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, hal 189

¹³ *Ibid*, hal 193

¹⁴ *Ibid*, hal 105

Menurut KH. Sofyan Tsauri (Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Bogor), yang terpenting adalah bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu hadir dalam kaidah kehidupan dan kemudian publik mengarahkan potensinya untuk tidak melakukan kezaliman pada apapun dan siapapun dan tidak menghabiskan waktu dengan perdebatan yang tidak berujung pangkalnya.

Didirikannya Partai Keadilan Sejahtera adalah dengan tujuan yang sudah sangat jelas dalam rangka “mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Dengan kata lain, PKS ingin menciptakan negara berkeadilan dan berkesejahteraan.

KH. Sofyan Tsauri juga menjelaskan bahwa tidaklah penting menangkap wacana negara Islam atau bukan negara Islam, karena negara ini milik umat Islam. Sejak awal kita mengidentifikasi diri kalau kita bukan orang luar negeri ini, tapi sebagai bagian dari negeri ini. Dulu orang mengelola negara dengan cara secular, sekarang kita ingin mengelola negara ini dengan cara Islam, itu intinya. Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah mengusung negara Islam ataupun syari’at Islam.

PKS melihat fenomena formalisasi syariat Islam ini sebagai wajah demokrasi yang harus dihormati, pernyataan PKS yang terkesan mendukung ini diungkapkan Hidayat Nurwahid. Pernyataan Hidayat ini menjadi bisa difahami ketika dihubungkan dengan sikap PKS dalam penegakan syari’at Islam. PKS tidak hanya dikenal sangat mendukung penerapan syari’ah tetapi juga merancang sejumlah tahapan pelaksanaannya, yaitu: gerakan individual, gerakan sosial dan pendidikan, gerakan sosial politik, gerakan legislasi, dan kons-titusionalisme.¹⁵

Menurut PKS, terdapat tiga arti penerapan syari’at Islam. Pertama, mengakomodasi satuansatuan hukum (perdata dan pidana) dalam konstitusi dan undang-undang serta

¹⁵ Nandang Burhanuddin, *Penegakan Syari’at Islam Menurut Partai Keadilan*, Jakarta: alJannah Pustaka, 2004), h. 107118.8

berbagai penjelasan hukum nya. Kedua, mengisi segenap ruang konstitusi dan undang-undang dengan berbagai penjabaran hukumnya, di Indonesia, dengan ajaran Islam, sehingga dengan pengertian ini Islam dipandang sebagai aspek utama yang mewarnai seluruh sistem hukum nasional.

Fakta bahwa partai politik seperti PKS turut serta dalam gerbong formalisasi syariat Islam, PKS berhasil menebar simpati di kalangan masyarakat luas, sehingga jika itu berhasil, maka berdasarkan tahapan strategi penerapan syariat Islam oleh PKS, setidaknya tahapan pertama telah tercapai.

Apabila IM memiliki sikap tegas bahwa syariat Islam adalah satu-satunya hukum yang harus ditegakkan, hal ini berbeda dengan sikap PKS. Pasca pemilu 2004 PKS memiliki sikap yang tidak tegas dalam hal pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, PKS melihat penerapan Syariat Islam janganlah hanya dilihat dari rajam atau Qisas saja namun Syariat Islam haruslah dilihat dari semangat dan spiritual, seperti syariat tidak boleh mencuri, korupsi atau larangan lainnya, karenanya penerapan Syariat Islam haruslah dilakukan secara gradual dan tertata rapi hingga rakyat memahami hakikat penerapan syariat Islam¹⁶.

Sikap PKS yang tidak tegas ini ketika Tim melakukan wawancara dengan tokoh dan anggota PKS mengatakan bahwa penerapan syariat Islam secara utuh membutuhkan waktu yang panjang, itu agar masyarakat siap menerimanya, karena masyarakat belum memahami betul hakikat syariat Islam ini, karenanya maka bahasa yang dipakai PKS saat ini adalah bahasa-bahasa kiasan agar masyarakat jangan apriori terbelah dahulu¹⁷.

PKS tidak menyuarkan isu penerapan syariat Islam secara konstitusi namun Syariat Islam adalah kehidupan realita sosial masyarakat dan bukan saja hanya dalam konstitusi hukum yang terealisasi dari sikap tidak korupsi dan Islam yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Wawancara Tim Peneliti Al-Azhar dengan PKS pada 17 Mei 2010

Hidayat Nur Wahid sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara M Salaby mengatakan bahwa syariat Islam jangan difahami secara kaku dan Dogmatis, penerapannya haruslah sesuai dengan aturan dan undang-undang sebuah negara, persatuan dan kesatuan ummat haruslah diutamakan, Tindakan refresif hanyalah akan mengundang arus penolakan yang lebih luas, penerapan syariat islam haruslah dilakukan pada nilai-nilai berpolitik yang santun dan bersih, tidak KKN dan menguatkan SDM untuk pembangunan bangsa dan negara¹⁸.

Dalam Musyawarah Majelis Syura X, PKS memiliki sikap terkait dengan NKRI. Menurut PKS, NKRI adalah final, PKS tak ingin memisahkan diri dari nusantara karena menurutnya persatuan Indonesia adalah final yang harus dijunjung tinggi, nilai nilai persatuan yang terkandung haruslah diamalkan secara verbal. Teori Khilafah yang dikembangkan oleh IM adalah terori lunak yang tidak harus menjadikan sebuah negara memisahkan diri dari sebuah komunitas, sebuah negara tetap bisa menjadi negara dengan segala ideologinya, namun yang dituntut IM adalah keharusan negara tersebut menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam berbangsa dan bernegara. Konsep NKRI yang usung oleh PKS dengan apa yang disebut IM tak terlihat adanya pertentangan, jadi bisa saja NKRI tetap utuh, namun secara budaya dan politik Indonesia harus menganut nilai-nilai islam yang luhur seperti yang sering diutarakan tokoh-tokoh PKS.

¹⁸ M. Salaby, *Pemikiran Politik Hidayat Nur Wahid, Penerapan Syariat Islam di alam demokrasi studi kasus PKS*, , tanpa publikasi.